

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menjelang pesta demokrasi 2024, isu politik identitas kembali ramai di media sosial. Kemunculan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dalam video azan Maghrib di stasiun televisi di Indonesia, dinilai sebagai bentuk dari politik identitas. Video tersebut memperlihatkan sosok Ganjar Pranowo yang tengah berwudhu kemudian sholat berjamaah di sebuah Masjid dengan mengenakan baju kokoh putih, peci hitam dan sarung.¹ Hal ini kemudian menuai berbagai komentar dari masyarakat Indonesia. Anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Totok Hariono mengatakan bahwa pihaknya sedang menelusuri apakah ada unsur etik atau norma kampanye yang dilanggar dari penayangan tersebut. Namun pengamat Pemilu, Kaka Sumita berpendapat, tampilan video Ganjar Pranowo dinilai sudah termasuk politisasi identitas karena menonjolkan agama atau keyakinannya untuk mempengaruhi pilihan masyarakat.²

Di Indonesia, pembahasan terkait politik identitas sebenarnya bukan isu baru, apalagi menjelang tahun-tahun politik. Sebab, isu politik identitas juga pernah terjadi pada ajang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Saat itu, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), yang maju

¹ ATCH, "Adzan Maghrib MNCTV Terbaru 2023," 8 September 2023, https://www.youtube.com/watch?v=49vkqKX_rWo (diakses pada 25 September 2023).

² "Ganjar Pranowo Muncul di Video Azan Televisi Picu Polemik-Apa dan Mengapa Kampanye Politik Identitas Digunakan?", 11 September 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd1mmn3e31yo>. (diakses pada 25 September 2023).

sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta, dinilai telah melakukan penistaan agama atas pernyataannya pada surah Al-Maidah ayat 51 yang kemudian memunculkan Aksi Damai 212. Jutaan Umat Islam yang datang dari berbagai daerah, berkumpul dan membanjiri Kota Jakarta.³

Kondisi serupa juga terjadi pada Pemilihan Presiden tahun 2019. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sony, pengaruh politik identitas pada kemenangan Anies-Sandi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menimbulkan kekhawatiran pada diri Joko Widodo. Sebab, saat itu, Jokowi di tuduh sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI), antek asing, dan dituduh sebagai pemimpin yang benci dengan Islam. Atas dasar itulah, menurut Sony, Ma'ruf Amien dipilih Joko Widodo sebagai Calon Wakil Presiden pada Pilpres 2019 yang lalu.⁴

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Saeful Mijab dan Azhar Irfansyah, dipilihnya Ma'ruf Amin sebagai Cawapres merupakan strategi politik identitasnya Jokowi. Sebab, personal branding Ma'ruf Amin sebagai penyandang gelar Kiyai yang telah malang melintang dalam urusan keislaman, tampilannya sebagai sesepuh, selalu berpeci dan bersarung, ditambah lagi latar belakang dari Nahdhatul Ulama (NU) dapat memuluskan jalan Jokowi dalam merangkul suara Umat Islam. Apalagi saat itu, ia memegang posisi sentral di MUI dan juga turut membentuk gerakan 212 yang mendakwa Ahok sebagai penista agama.⁵

³ Idzham Fautanu, dkk, "Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017 Perspektif Pemikiran Politik Nurcholis Madjid," *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2, No. 2 (2020), p.88.

⁴ Sony, "Peta Politik Identitas di Indonesia: Study Terpilihnya K.H Ma'ruf Amien Sebagai Bakal Cawapres Inkumben Joko Widodo Pada Pilpres 2019," *Jurnal Renasissance*, Vol.4 No.1 (Mei, 2019), p.445.

⁵ Saeful Mujab dan Azhar Irfansyah, "Komunikasi Politik Identitas K.H Ma'ruf Amin Sebagai Strategi Depolarisasi Agama pada Kontestasi Demokrasi Pilpres 2019," *Jurnal Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol.3, No. 01. (2020), p.55.

Sejauh pengamatan penulis, politik identitas sangat kuat dirasakan pada pemilu 2019. Hal ini terlihat dari fakta bagaimana perdebatan keras selalu terjadi di ruang publik. Masyarakat Indonesia secara politik terpolarisasi ke dalam dua kubu; yaitu kubu Cebong untuk pendukung Jokowi dan Kampret untuk pendukung Prabowo.⁶ Kedua istilah ini berkembang menjadi identitas dari masing-masing pendukung hingga menimbulkan perpecahan di masyarakat. Menurut Wawan Mas'udi, seorang Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) seperti yang dikutip oleh Abdullah Hamid, dkk, fenomena politik semacam ini hampir tidak pernah terjadi di negara lain, yang menggunakan istilah-istilah hewan untuk menyebut atau mengolok-olok orang yang berbeda pilihan politiknya. Hal ini terindikasi bahwa rakyat Indonesia belum matang dalam berdemokrasi.⁷

Bukan hanya di tingkat nasional, politik identitas juga berlaku di hampir seluruh wilayah Indonesia. Di Sumatera Utara misalnya, beberapa kali edisi pemilihan Gubernur selalu menghadirkan calon dari Etnis Jawa, karena Etnis Jawa merupakan etnis terbesar di Sumatera Utara. Fenomena yang sama juga terjadi di Sumatera Barat. Wacana tentang politik

⁶ Cebong merupakan istilah yang dimunculkan oleh kubu yang anti Jokowi dengan tujuan mengejek pendukungnya. Istilah ini tidak lepas dari kebiasaan Jokowi sendiri yang hobi memelihara kodok dan cebong di kolam istana negara supaya dapat merasakan suasana pedesaan yang dulu melekat dalam kehidupan Jokowi. Sementara istilah Kampret sebagai respon dari ejekan Cebong. Kampret merupakan binatang sejenis kelelawar yang suka tidur dengan posisi terbalik kaki di atas atau pada awalnya digunakan untuk memberi label terhadap seseorang yang sering menggunakan logika terbalik. Lihat Abdullah Hamid, dkk, "Fenomena Politik Cebong dan Kampret di Indonesia Sebuah Analisis dari Perspektif Pemikiran Politik dalam Islam," *Jurnal POLITEA*, Vol.1, No.1 (2018), p.33.

⁷ Abdullah Hamid, dkk, "Fenomena Politik Cebong dan Kampret di Indonesia Sebuah Analisis dari Perspektif Pemikiran Politik dalam Islam", p.33.

identitas juga menjadi perbincangan pada setiap perhelatan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah.⁸

Maraknya isu penggunaan identitas dalam berpolitik memunculkan sejumlah pendapat dari berbagai kalangan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, meminta kepada seluruh Calon dan Partai Politik agar tidak menggunakan politik identitas saat kampanye pada Pemilu 2024 mendatang. Jokowi menyatakan, semua Calon dan Partai Politik yang ikut serta dalam Pemilu 2024 harus mengedepankan adu gagasan bukan Politik Identitas. Hal ini Ia sampaikan lewat pidatonya di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Bulan Bintang (PBB).⁹

Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H Ma'ruf Amin juga memiliki pandangan yang sama dengan Jokowi. Ia meminta kepada para pemimpin Partai Politik agar tidak lagi berkampanye dengan menggunakan unsur identitas, baik agama, ras dan antargolongan (SARA). Menurutnya, masyarakat sekarang sudah cerdas dan sudah tahu siapa Calon yang akan dipilihnya nanti. Ma'ruf mencontohkan kedewasaan masyarakat Indonesia terlihat dari persoalan perbedaan waktu penentuan Hari Raya.¹⁰

⁸ Rinaldi, dkk, "Wacana Politik Identitas Jamaah Syatariah pada Pemilu 2019," dalam *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, Vol. 04, No. 01 (2020), p.59.

⁹ M. Julnis Firmansyah, "Jokowi Minta Pemilu 2024 Tak Ada Politik Identitas: Menanglah Dengan Intelek," 11 Januari 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1678412/jokowi-minta-pemilu-2024-tak-ada-politik-identitas-menanglah-dengan-intelek>. (diakses pada 25 September 2023).

¹⁰ Fauziah Mursyid, "Dalam Konteks Individu, Wapres Berpendapat Politik Identitas Sah-Sah Saja," 18 Agustus 2022, <https://news.republika.co.id/berita/rgtiko320/dalam-konteks-individu-wapres-berpendapat-politik-identitas-sah-sah-saja>. (diakses pada 25 September 2023).

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, juga menolak adanya identitas-identitas yang digunakan sebagai senjata politik untuk mencari dukungan, baik identitas Islam maupun identitas NU sendiri. Sebagai Ketua PBNU, ia akan berusaha untuk mencegah NU dijadikan sebagai alat politik identitas. Hal ini ia sampaikan saat dirinya di undang di acara Kompas TV.¹¹

Sementara Dewan Pembina Alumni 212, Rizieq Shihab, memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, penggunaan identitas dalam berpolitik boleh saja digunakan, asalkan tidak menggunakan politik identitas SARA, fasis dan rasis. Rizieq mengatakan bahwa politik identitas yang diusung Ulama tetap bermartabat dengan berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, Rizieq juga menyampaikan, bahwa kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari unsur politik identitas. Perjuangan Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, hingga Teuku Umar melawan penjajahan dengan semangat politik identitas. Bahkan Pancasila pun menurut Rizieq Shihab disusun dengan politik identitas.¹²

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi bahkan menyatakan secara terang-terangan terkait politik identitas. Ridho menyatakan bahwa Partainya (Partai Ummat) akan menggunakan politik identitas keagamaan pada Pemilu 2024 mendatang. Sebab, dunia politik tidak bisa dipisahkan dari agama. Menurut Ridho, jika politik tanpa moralitas agama, maka

¹¹ Youtube Kompas TV, “Agama Jadi Senjata Politik, Rentan Picu Konflik,” 7 November 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=1E7bjEv4OvU>. (diakses pada 25 September 2023).

¹² CNN Indonesia, “Rizieq Shihab Serukan Politik Identitas di Ijtimak Ulama II,” 16 September 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180916152502-32-330602/rizieq-shihab-serukan-politik-identitas-di-ijtimak-ulama-ii>. (diakses pada 25 September 2023).

politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional.¹³

Dalam beberapa tahun terakhir, isu politik identitas memang menjadi topik hangat dan menarik yang diperbincangkan dalam banyak ragam bidang keilmuan. Para ahli tertarik dengan studi ini karena berkaitan erat dengan sektor kewilayahan, kedaerahan, sejarah, agama, budaya, dan konstruksi sosial, serta perbedaan antar individu.¹⁴ Secara teoritis politik identitas menurut Lukmantoro seperti yang dikutip oleh Juhana Nasrudin adalah politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau kegamaan.¹⁵ Di tahun-tahun politik, Identitas ini seringkali dimanfaatkan oleh calon dan partai politik sebagai alat atau strategi politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik.

Sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki beraneka ragam suku bangsa, etnis atau kelompok sosial, kepercayaan, agama dan kebudayaan dari daerah satu dengan daerah lain yang mendominasi khazanah budaya Indonesia. Keragaman ini kemudian disatukan menjadi “Bhineka Tunggal Ika” yang memiliki pengertian berbeda-beda, tetapi tetap menjadi satu,

¹³ “Mengapa Partai Ummat Gaungkan ‘Politik Identitas dan Kenapa Itu Dianggap ‘Berbahaya?’,” 22 Februari 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c14nxqz57jqo>. (diakses pada 25 September 2023).

¹⁴ Muthohirin Nafik, “Politik Identitas Islam dan Urgensi Pendidikan Multikultural,” *dalam Jurnal J-PAI*, Vol.6, No.1 (2019), p.47.

¹⁵ Juhana Nasrudin, “Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2019),” *dalam Jurnal Hanifiya: Jurusan Studi Agama-Agama*, Vol. 01, No.01 (2018), p.36.

yang mengingatkan kita betapa pentingnya pluralisme dan multikulturalisme untuk menjaga persatuan dari kebhinekaan bangsa.¹⁶

Di dalam Al-Qur'an, keragaman etnis, suku dan bangsa di gambarkan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut. Sebagaimana Firman Allah Swt berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.

Selain itu, keragaman agama dan keyakinan juga digambarkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 62. Sebagaimana firman Allah Swt berikut:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari Akhir serta melakukan kebajikan (pasti) mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih hati.”

¹⁶ Agnes Vanesia, dkk, “Pentingnya Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Masyarakat,” dalam *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.25, No.2 (Juni 2023), p.242.

Lantas bagaimana Al-Qur'an memandang masalah politik identitas ini? Tentu sangat penting untuk kita kaji secara mendalam. Sebab, sebagai sebuah kitab yang kita yakini *syamil* dan *mutakamil*, tentu setiap hal pasti disinggung dalam Al-Qur'an, baik secara langsung atau tidak langsung. Langsung maknanya adalah secara eksplisit ada ayat-ayat yang membahas langsung satu topik tertentu. Sementara tidak langsung maknanya tidak secara eksplisit digambarkan dalam Al-Qur'an, namun secara implisit, spirit dan maknanya terdapat ayat-ayat yang terkait dengan suatu topik tersebut.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk lebih mendalami bagaimana pandangan Ibnu Katsir sebagai ulama klasik dan Buya Hamka sebagai ulama kontemporer terhadap isu politik identitas ini. Tentu hal ini dimaksudkan agar kita sebagai hamba atau insan mengetahui identitas masing-masing sehingga terhindar dari polarisasi apalagi menjelang tahun-tahun politik. Semuanya tentu harus merujuk pada sumber utama Islam yaitu Al-Qur'an, Hadist serta pendapat dari ulama. Jadi, penulis akan mengkaji lebih dalam tentang "POLITIK IDENTITAS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI PENAFSIRAN IBNU KATSIR DAN HAMKA)".

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana al-Qur'an berbicara tentang politik identitas?
2. Bagaimana Pandangan Ibnu Katsir dan Buya Hamka terkait Politik Identitas?
3. Dampak Positif dan Negatif Politik Identitas?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana umumnya sebuah tindakan analisis yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki arah dan tujuan tertentu. Maka demikian juga dengan penulis yang memiliki arah dan tujuan dalam penelitian ini. penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Politik Identitas dalam Al-Qur'an
2. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Katsir dan Buya Hamka terkait fenomena Politik Identitas.
3. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari politik identitas.

D. Manfaat Penelitian

Dibawah ini merupakan beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, dapat mengetahui dan menjelaskan tentang definisi politik identitas dan fenomena politik identitas menurut al-quran.
2. Bagi kalangan akademik, diharapkan menambah teori dan wawasan baru tentang fenomena politik identitas.
3. Bagi umat Islam, menambah pengetahuan dan wawasan al-qur'an tentang politik identitas.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara akademik untuk memenuhi tugas dalam rangka meraih gelar strata satu (S1) dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
2. Secara teoritis untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang penafsiran Al-Qur'an.

3. Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi pengetahuan dan memperkaya wacana seseorang atau kelompok tentang pandangan para mufassir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan politik identitas.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah penelitian. Oleh karena itu, dengan adanya tinjauan pustaka, penelitian kita menjadi lebih jelas sumbernya dan bisa diketahui perbedaannya dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Maka berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis akan merujuk kepada beberapa literatur kepustakaan. Dalam hal ini, penulis menemukan beberapa literatur yang terkait dengan tema pembahasan kali ini, diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang berjudul "*Politik Identitas Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik Ayat-Ayat Politik Identitas Dalam Al-Qur'an)*" yang ditulis oleh Muhammad Muis, salah satu mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut PTIQ Jakarta tahun 2020. Dalam Skripsi ini, Muhammad Muis lebih fokus pada makna identitas dalam perspektif Al-Qur'an dan beberapa penafsiran dari ulama tafsir. Meskipun tema tersebut masuk dalam pembahasan penelitian ini, tetapi dari segi judul dan pembahasan secara menyeluruh dalam penelitian yang ditulis oleh Muhammad Muis sangatlah berbeda. Penulis lebih memfokuskan pada pandangan Ibnu Katsir dan Buya Hamka.

Kedua, Jurnal yang berjudul "*Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia*", yang ditulis oleh Haikal Fadhil Anam dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019. Dalam penelitian ini, Fadhil Anam meneliti tentang pengaruh politik

identitas terhadap demokrasi di Indonesia. Penelitian ini akan menjadi sumber tambahan penulis dalam meneliti tentang politik identitas dalam perspektif Al-Qur'an.

Ketiga, Jurnal yang berjudul "*Dakwah Islam moderat dan Realitas Politik Identitas dalam Masyarakat Meme*" yang ditulis oleh Abdul Muid Nawawi, salah satu Mahasiswa Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta tahun 2019. Dalam penelitian ini Abdul Muid Nawawi meneliti tentang penyebab lahirnya politik identitas dan menawarkan solusi tepat bagi keterbelahan masyarakat akibat politik identitas. Penelitian ini akan menjadi sumber tambahan penulis dalam meneliti tentang politik identitas dalam perspektif Al-Qur'an.

Keempat, Jurnal yang berjudul "*Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia*", yang ditulis oleh Hubertus Herianto dan Robertus Wijanarko, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang tahun 2022. Dalam penelitian ini Hubertus Herianto dan Robertus Wijanarko meneliti tentang fenomena kelahiran populisme berwajah politik identitas keagamaan di Indonesia. Penelitian ini akan menjadi sumber tambahan penulis dalam meneliti tentang politik identitas dalam perspektif Al-Qur'an.

Kelima, Buku yang berjudul "*Politik Identitas Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Teori Modern*", yang ditulis oleh Eman Sulaeman tahun 2022. Dalam buku ini Eman Sulaeman menjelaskan secara rinci terkait politik identitas, baik dari sejarah, pro-kontra dan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan politik identitas. Namun yang membedakan dari penelitian ini adalah penulis lebih memfokuskan penelitian politik identitas menurut pandangan Ibnu Katsir dan Buya Hamka.

Keenam, Jurnal yang berjudul “*POLITIK IDENTITAS: Ancaman Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Negara Pancasila*”, yang ditulis oleh Leli Salman Al-Farisi, FISIP Universitas Wiralodra, Indramayu tahun 2018. Dalam penelitian ini, Salman Al-Farisi meneliti tentang ancaman dan bahaya penyalahgunaan Politik Identitas bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan NKRI sebagai Negara Pancasila. Penelitian ini akan menjadi sumber tambahan penulis dalam meneliti tentang politik identitas dalam perspektif Al-Qur’an.

Ketujuh, Jurnal yang berjudul “*Pilkada, Politik Identitas Dan Kekerasan Budaya*”, yang ditulis oleh Idham dan Suaib Amin Pranowo, Balai Litbang Agama Kementerian Agama Makasar, Sulawesi Selatan tahun 2020. Dalam penelitian ini, Idham dan Suaib meneliti tentang sisi lain dari politik identitas yang kerap hadir mewarnai pergolakan politik di tingkat lokal (pilkada) serta kaitannya dengan kekerasan budaya. Penelitian ini akan menjadi sumber tambahan penulis dalam meneliti tentang politik identitas dalam perspektif Al-Qur’an.

Kedelapan, Artikel yang berjudul “*Analisis Politik Identitas di Indonesia*”, yang ditulis oleh Muhammad Habibi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda tahun 2017. Dalam penelitian ini Muhammad Habibi meneliti tentang fenomena terjadinya politik identitas di Indonesia Identity Politics in Indonesia. Penelitian ini akan menjadi sumber tambahan penulis dalam meneliti tentang politik identitas dalam perspektif Al-Qur’an.

G. Kerangka Teori

Politik identitas merupakan sebuah haluan politik yang berbasis pada identitas tertentu. Kata “politik” merujuk pada pengetahuan tentang ketatanegaraan, negara atau pemerintahan. Sedangkan “identitas” menurut Hogg adalah konsep tentang bagaimana seseorang memandang diri mereka sendiri, jenis kelamin, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain.¹⁷

Dalam karyanya yang berjudul “Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita” Buya Syafi’I Maarif menyatakan bahwa L.A. Kauffman adalah orang pertama yang mengemukakan esensi politik identitas. Kauffman menelusuri akar pergerakan tersebut dengan merujuk pada gerakan mahasiswa anti kekerasan, SNCC (The Student Nonviolent Coordinating Committee), sebuah organisasi hak-hak sipil Amerika Serikat pada tahun 1960-an.¹⁸

Sedangkan menurut Lukmantro, politik identitas adalah sebuah konsep yang menekankan pada kepentingan khusus dari anggota atau kelompok yang memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik itu didasarkan pada ras, etnisitas, atau agama. Politik identitas juga dapat dianggap sebagai sebuah upaya politis untuk mengartikulasikan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan publik yang dianggap penting. Dalam politik identitas yang berbasis agama, sering terdapat usaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam suatu kebijakan.¹⁹

¹⁷ Haikal Fadhil Anam, “Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia”, dalam *POLITEA: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 2 No. 2 (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), p.182.

¹⁸ Anam, “Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia”, p.182.

¹⁹ Anam, “Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia”, p.182.

Di Indonesia, politik identitas seringkali didasarkan pada faktor-faktor seperti agama, bahasa, adat istiadat, dan asal-usul kelompok sosial tertentu, yang berbeda dari faktor-faktor ideologi dan kepentingan yang lebih umum.²⁰

Menarik untuk dibahas isu politik yang berkaitan dengan perbedaan agama karena dapat memunculkan politik identitas agama. Seperti yang telah diketahui, politik identitas agama selalu hadir dalam dunia politik Indonesia. Beberapa momen pemilihan umum kepala daerah telah memberikan bukti konkret tentang bagaimana identitas agama dapat menjadi kekuatan politik.

Dalam hal ini, sejumlah tokoh ternama di Indonesia ikut menyuarakan pendapatnya terkait wacana politik identitas. Mulai dari Presiden Joko Widodo, Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf, Rizieq Shihab dan sejumlah tokoh lainnya.

Perbedaan pendapat tersebut menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait politik identitas dalam Al-Qur'an menurut pandangan Ibnu Katsir dan Buya Hamka.

H. Metode Penelitian

Supaya penelitian ini layak dikatakan baik, maka metode adalah hal yang urgensi dalam suatu penelitian. Oleh karena itu peneliti akan memaparkan metode yang berkaitan dalam penelitian ini.

²⁰ Saeful Mujad dan Azhar Irfansyah, "Komunikasi Politik Identitas K.H Ma'ruf Amin sebagai Strategi Depolarisasi Agama pada Kontestasi Demokrasi Pilpres 2019", dalam *Jurnal Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol.3, No. 01. (2020), p.57.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil data yang bersifat library research (Kepustakaan)²¹. Untuk itu penulis melakukan langkah-langkah identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan pengkajian terhadap data-data yang telah ada terkait politik identitas, baik berupa data primer maupun data sekunder secara actual dan faktual²². Data primer dimaksud adalah Kitab Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka. Sementara data sekunder dimaksud adalah literature-literatur lain berupa buku-buku, hasil penelitian, dan artikel-artikel lain yang tentunya berkaitan dengan masalah Politik Identitas guna melengkapi data primer.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, data-data yang digambarkan dianalisa menggunakan metode menganalisis isi dan mendialogkannya sehingga membuahkan hasil penelitian yang dapat mendeskripsikan secara komprehensif, sistematis dan obyektif tentang permasalahan seputar Politik Identitas. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian deskriptif²³.

Selain itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan maudhu'i agar hasil penelitian dapat menggambarkan obyek penelitian secara sistematis, komprehensif dan benar serta praktis. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan adalah:

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi, 1993), p.42.

²² Ahmadi Muhammad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Riset* Cet. 1 (Yogyakarta: Sumbangsih, 1973), p.2.

²³ Winarto Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode dan Teknik)* Cet. 1 (Bandung: Tarsito, 1994), p.141.

- 1) Menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan Politik.
- 2) Menyusun dan memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan Politik Identitas tersebut dalam suratnya masing-masing.
- 3) Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan masalah Politik Identitas.
- 4) Mempelajari ayat-ayat yang terkait dengan politik tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan antara yang umum (umum) dan yang khusus (khusus), muthlaq (mutlak) dengan muqayyad (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan dan pemaksaan²⁴.

3. Metode Mengambil Kesimpulan

Setelah semua data di atas di analisis, kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan secara deduktif, yakni pengambilan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan penafsiran-penafsiran di dalam al-Qur'an terhadap Politik Identitas. Yang kemudian dijadikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1993), p.176.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka penulisan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakangi penelitian ini. Kemudian penegasan istilah dan rumusan masalah yang dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian dan kajian pustaka untuk memberi penjelasan dimana posisi penulis dalam hal ini dan dimana letak kebaruan dalam penelitian ini. Sementara metode dan langkah-langkah penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini. Pendekatan apa yang mau dipakai serta bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan.

Bab kedua, merupakan uraian tentang politik identitas. Dalam bab ini penulis akan menguraikan pengertian politik, pengertian identitas, Etika Politik dalam Islam, pengertian identitas, Konsep Politik Identitas, dan Potret Politik Identitas di Indonesia.

Bab ketiga, biografi Ibnu Katsir dan Buya Hamka. Dalam bab ini penulis menyajikan biografi pengarang yang berisikan riwayat hidup, aktivitas keilmuan, karya-karya dari kedua mufassir tersebut, dan sekilas tentang Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka

Bab keempat, Penulis akan menguraikan ayat-ayat yang berkaitan dengan identitas dalam Al-Qur'an, penafsiran Ibnu Katsir dan Buya

Hamka, analisis dari penulis, kemudian dilanjutkan dengan melihat dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari adanya politik identitas.

Bab kelima, merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini, yang menguraikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, dan saran-kritik untuk perbaikan. Disamping itu juga uraian daftar pustaka (referensi-referensi) yang telah dijadikan bahan penelitian ini.